

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi perekonomian seperti saat ini telah menimbulkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan. Isu permasalahan lingkungan telah menjadi perbincangan hangat diberbagai negara pada dekade terakhir ini. Isu permasalahan lingkungan yang menjadi topik pembahasan antara lain pemanasan global (*global warming*), iklim ekstrem, limbah plastik, polusi udara dan pencemaran lingkungan tanah/lahan & pencemaran lingkungan air. Mengingat tersebut permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini telah mencapai titik keperihatinan penuh. Hal ini dapat berdampak pada isu keberlanjutan dan keberlangsungan hidup manusia dimasa depan. Mengingat manusia terus melakukan regenerasi yang selaras membutuhkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Isu permasalahan lingkungan yang krusial ini harus mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya keberlangsungan setiap generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran manusia dalam hal lingkungan juga harus mendapatkan perlakuan khusus.

Perkembangan industri secara signifikan memberikan dampak pada suatu negara. Dampak perkembangan industri atas optimalisasi penggunaan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan industri salah satunya dapat meningkatkan perekonomian yang mampu membangun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dimana hal ini mendorong perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Selain itu, perkembangan industri memberikan dampak yang kurang baik salah

satunya terhadap lingkungan. Dalam aktivitas bisnis, perusahaan tidak dapat terpisahkan atas lingkungan baik dari segi tempat usaha maupun pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas perusahaan sangat bergantung pada lingkungan maka hal yang tidak bisa dipungkiri terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat terjadi. Pencemaran lingkungan ini akan mengakibatkan efek buruk terhadap keberlangsungan bisnis. Semakin banyak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi juga tuntutan pihak eksternal terutama *stakeholders* untuk mengatasi hal tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain itu dilengkapi dengan adanya revolusi industri 5.0 dan kemajuan teknologi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun secara tidak sadar tindakan ini mengesampingkan aspek lingkungan yang akhirnya akan bermuara pada kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia sangat banyak terjadi. *Environmental Performance Index* (2022) melaporkan tingkat pelestarian lingkungan hidup Indonesia tergolong buruk di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menempati urutan ke – 22 dengan nilai pelestarian lingkungan sebesar 28,2% lebih rendah. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator yaitu vitalitas ekosistem, kesehatan dan kebijakan iklim suatu negara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2020 – 2022 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,97. Namun secara perincian indeks kualitas lahan masih tetap tidak mengalami kenaikan. Sedangkan dari indeks kualitas air mengalami

kenaikan namun masih bersifat fluktuatif mulai tahun 2020 sampai 2022. Sehingga melalui KLHK pada tahun 2018 mulai membuat kebijakan berupa program langit biru dan program Indonesia hijau untuk menunjang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* bagi keberlanjutan lingkungan Indonesia di masa depan.

Ilmu akuntansi mulai berkembang kendati masalah krisis lingkungan yang terjadi. Dalam ranah akuntansi muncul konsep ilmu pengetahuan yaitu akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan mengalokasikan biaya – biaya lingkungan kedalam pengambilan keputusan bisnis yang berguna bagi pemangku kepentingan (Ikhsan, 2009). Pengeluaran biaya ini harus ditanggung oleh pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dan tekad mengamankan lingkungan. Akuntansi lingkungan disinyalir akan adanya *triple bottom line theory* yang mengedepankan tiga aspek dalam peningkatan kinerja yakni *profit*, *people* dan *planet* (Elkington, 1998). Berdasarkan peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa individu yang berkegiatan dan berusaha memiliki hak peran dan kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Sehingga baik dalam industri mikro seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup terutama area sekitar usaha.

Akuntansi lingkungan pada dasarnya hadir untuk menyempurnakan dan menutupi keterbatasan praktik akuntansi konvensional saat ini. Implementasi akuntansi lingkungan memerintahkan manajemen untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengukur, dan mengungkapkan biaya – biaya lingkungan.

Oleh karena itu, supaya mempermudah implementasi ini maka muncul konsep tentang akuntansi manajemen lingkungan atau *environmental management accounting* (EMA). *Environmental management accounting* (EMA) merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, megklasifikasikan dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan (lingkungan) yang berguna bagi manajemen dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Hansen & Mowen, 2009). Biaya lingkungan menurut Hansen & Mowen (2009) merupakan sejumlah biaya yang terjadi atau mungkin terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk. Oleh karena itu biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Akuntansi manajemen lingkungan dalam praktiknya saling berintegrasi dengan lingkungan dan kebijakan perusahaan sebagai arah bisnis menuju keberlanjutan kinerja keuangan dan lingkungan. Oleh sebab itu, akuntansi lingkungan maupun akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya untuk satuan yang berskala besar melainkan sangat memungkinkan diterapkan pada sektor mikro.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Di Indonesia menurut pernyataan Kementerian Keuangan RI (2023) UMKM berhasil menjadi usaha yang mendominasi dan memberikan sumbangsih perekonomian terbesar bagi masyarakat dengan nilai komposisi 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Oleh karena itu, optimalisasi mutu pemberdayaan kinerja UMKM harus di tingkatkan. Seperti layaknya perusahaan besar pada umumnya kegiatan bisnis UMKM dapat meliputi usaha bisnis berbasis jasa, dagang maupun manufaktur. Data Kementerian Perindustrian

(2021) melaporkan industri yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian di negara Indonesia adalah industri pengolahan (manufaktur) dengan total nilai kontribusi sebesar 24,24%. Salah satu UMKM di bidang industri pengolahan adalah industri batik.

Di Indonesia berdasarkan data Balai Besar Kerajinan Batik (2021) di bawah naungan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa jumlah industri batik mulai dari yang berskala besar sampai kecil berjumlah 3.159 unit. Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori industri batik terbesar di Indonesia. Salah satu batik yang terkenal di wilayah Jawa Timur adalah Batik Madura. Batik Madura merupakan salah satu jenis batik pesisir yang memiliki nilai keindahan tersendiri. Sejarah awal mengatakan bahwa Batik Madura berasal dari Batik Keraton Madura. Sehingga seluruh wilayah Madura yang terdiri dari empat kabupaten antara lain Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki motif batik madura yang berbeda beda. Salah satu industri batik yang ada di Madura yaitu Batik Shalempang yang terletak di Kabupaten Sampang.

UMKM Batik Shalempang merupakan salah satu industri batik yang berkegiatan memproduksi dan menjual produk batik khas Sampang. Seperti industri pengolahan batik pada umumnya dalam proses produksi pasti tidak akan pernah terlepas dengan yang dinamakan limbah produksi. Limbah merupakan hasil sisa atau buangan dari bahan baku yang telah digunakan dalam proses produksi yang memiliki dampak negatif jika tidak mendapatkan perlakuan pengelolaan yang baik. Adapun limbah yang dihasilkan dalam proses produksi batik adalah limbah cair hasil proses *finishing* yakni pewarnaan dan *pelorodan*. Menganut realitas yang ada, bahan pewarnaan batik di sejumlah industri batik masih menggunakan bahan pewarnaan berupa sistesis kimia yang mengandung

zat – zat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan peneilitian laboratorium menunjukan bahwa limbah batik sangat berpotensi membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan terkhusus aspek kesehatan, kerusakan dan kepunahan biota sungai maupun laut. Sehingga atas hal ini perlu adanya tindakan pengelolaan limbah guna mengurangi dampak negatif baik bagi bisnis maupun lingkungan eksternal bisnis. Mengacu pada kasus pencemaran lingkungan di Pekalongan yang menyebabkan sumber air masyarakat tercemar dikarenakan limbah batik.

Mengamati kondisi wilayah di kepulauan Madura yang disekelilingi oleh lautan dimana sebagian masyarakat bergantung pada lautan sebagai mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, upaya pelestarian wilayah perairan khususnya perairan laut maupun darat di kepulauan Madura perlu untuk ditingkatkan. Dalam hal limbah industri batik kebanyakan para pelaku usaha batik di wilayah Madura masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait kepedulian terhadap lingkungan. Sesuai kondisi yang ada menunjukan bahwa limbah hasil industri batik di sejumlah tempat masih dibuang secara sembarangan yakni ke sungai dan saluran air masyarakat. Lantas tindakan semacam ini dapat merusak ekosistem baik daratan maupun perairan. Selain itu juga akan merusak ekosistem lautnya mengetahui bahwa air tersebut akan bermuara ke darah lautan. Terkait tindakan ini terdapat kasus pelanggaran serupa yang terjadi di kabupaten Pamekasan membuang limbah batik sembarangan yang menyebabkan adanya kerusakan ekosistem perairan sungai. Mengenai perkara ini pelaku usaha yang terlibat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25 Juta atas tuntutan masyarakat.

Pada UMKM Batik Shalempang diketahui bahwa sudah menerapkan sistem pengelolaan limbah berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sistem pengelolaan limbah batik berbasis IPAL ini mulai diterapkan pada tahun 2023. Bentuk perwujudan pengelolaan atas limbah batik ini dilakukan atas tuntutan kepedulian pelaku bisnis UMKM Batik Shalempang terhadap limbah yang dihasilkan. Mengetahui bahwa tidak semua UMKM batik yang terdapat dipulau Madura telah menerapkan sistem IPAL dikarenakan memerlukan segenap biaya yang tergolong besar mulai dari rancang bangun dan operasionalnya. Sistem IPAL pada UMKM Batik Shalempang ini membutuhkan sejumlah biaya alokasi untuk pembangunan dan operasional pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan dapat mengambil peran untuk memaksimalkan kondisi IPAL dengan penilaian alokasi pengeluaran biaya dan manfaat (*benefits*). Biaya lingkungan dalam pembuatan IPAL dan sejenisnya termasuk dalam kategori biaya lingkungan yang muncul atas adanya aktivitas bisnis sebagai sarana keberlangsungan usaha dan pencegahan pencemaran lingkungan. Maka selayaknya biaya ini membutuhkan proses akuntansi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengklasifikasikan biaya sesuai kategori dalam hal ini menggunakan indikator biaya lingkungan Hansen & Mowen (2005). Penilaian dengan indikator ini cocok digunakan oleh bentuk usaha mikro dikarenakan masih memiliki integritas kecil terhadap lingkungan dengan dampak yang tidak begitu signifikan. Secara garis besar untuk mendukung kegiatan minimalisasi permasalahan lingkungan yang dihadapi perusahaan diharuskan untuk melakukan penilaian terhadap biaya (*environmental cost*) yang ditimbulkan atas aktivitas produksi perusahaan.

Terdapat bukti empiris dari penelitian sebelumnya tentang akuntansi lingkungan atau *green accounting*. Berbagai macam penelitian telah banyak dilakukan mulai dari yang menggunakan pendekatan kuantitatif (Sari *et al.* (2022), Sulistiawati & Dirgantari (2017), Anggita *et al.* (2022), Nabila (2021), Rosaline *et al.* (2020), Abdullah & Amiruddin (2020), Soleha & Isnalita (2022), Mustofa *et al.* (2020), Dianty & Nurrahim (2022), Dura & Suharsono (2022)) maupun pendekatan kualitatif (Astuti & Nugroho (2016), Astuti & Susilo (2014), Nasution & Agustin (2020), Wulandari *et al.* (2019), Soesanto (2022), Bayana & Praditha (2023), Salamah & Susilowati (2023), Sukirman & Suciati (2019), Ramadhani & Dewi (2020), Nurhidayat *et al.* (2020), Pratiwi (2013), Ratulangi *et al.* (2018), Wahyuni *et al.* (2020) dan Herlindawati *et al.* (2022)) untuk membahas mengenai akuntansi lingkungan berbasis *green accounting*. Hasil telah menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif mendominasi daripada pendekatan kualitatif (Paledung *et al.*, 2023). Penelitian kuantitatif dilakukan dengan memasukkan akuntansi lingkungan (*green accounting*) sebagai variabel untuk dilakukan pengujian terhadap variabel lainnya. Identifikasi temuan menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif masih memiliki karakteristik variabel dan hasil yang beragam. Beberapa hasil menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan (*green accounting*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, *environmental disclosure*, kinerja keuangan dan lingkungan. Hasil lain juga menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan (Dianty & Nurrahim, 2022). Keberagaman ini disebabkan oleh keterbatasan perolehan data yakni hanya sebatas pada laporan tahunan perusahaan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu untuk menggali data secara mendalam

terkait akuntansi lingkungan dan implikasinya maka cocok dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil telaah sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat penelitian yang mengusung topik akuntansi lingkungan maupun akuntansi manajemen lingkungan dengan pendekatan kualitatif. Namun penelitian pendekatan kualitatif sebelumnya terbatas pada pemahaman dan konsep akuntansi lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan. Konsep yang menjadi topik penelitian yaitu model pengungkapan, pengukuran, pelaporan dan pemeriksaan terkait akuntansi lingkungan. Tipe penelitian terdahulu ini dilakukan dengan bahan *literatur review* dan analisis peraturan tentang akuntansi lingkungan (*green accounting*). sepanjang pengetahuan peneliti penelitian tentang praktik akuntansi manajemen lingkungan masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri masih mengalami kesulitan untuk mengukur biaya lingkungan. Oleh karena itu, dalam penelitian mengambil celah memasukan konsep akuntansi manajemen lingkungan pada skema identifikasi dan klasifikasi biaya lingkungan pada objek penelitian.

Penelitian ini mengambil ruang bagi UMKM untuk dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan UMKM juga termasuk industri yang secara langsung terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Selain itu, UMKM merupakan sektor yang mendominasi perekonomian masyarakat. Bukti empiris di kedua sisi pendekatan penelitian menunjukkan industri berkategori besar lebih mendominasi untuk dijadikan objek penelitian. Industri tersebut berupa perusahaan BUMN dan perusahaan yang telah listing di BEI. Sepanjang pengetahuan penulis penelitian akuntansi manajemen lingkungan dengan objek UMKM masih jarang dilakukan.

Sehingga pernyataan ini menjadi dasar peneliti untuk menjadikan UMKM sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana identifikasi dan klasifikasi biaya lingkungan yang terdapat pada UMKM Batik Shalempang berdasarkan kategori Hansen & Mowen (2009)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya lingkungan berdasarkan kategori Hansen & Mowen (2009) yang terdapat pada UMKM Batik Shalempang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal berikut ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi manajemen lingkungan dalam tinjauan identifikasi dan klasifikasi alokasi biaya lingkungan pada industri perekonomian terutama di sektor usaha mikro.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis berikut ini.

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM Batik Shalempang terkait lingkungan sekitar. Sekaligus lebih mengoptimalkan alokasi biaya pencegahan limbah dengan manfaat yang didapatkan supaya operasional bisnis UMKM Batik Shalempang memiliki keuntungan secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk mengetahui biaya lingkungan yang terjadi di UMKM Batik Shalempang yang dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan bisnis kemasa depan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak pemerintahan terutama pemerintahan daerah kabupaten Sampang. Sebagai bahan pertimbangan dan wawasan bahwa sumbangsih kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh industri mikro terutama industri batik dikarenakan limbah batik menghasilkan berbagai persoalan lingkungan. Sehingga pihak *regulator* pemerintahan daerah mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian lingkungan industri kabupaten Sampang. Selain itu untuk Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan sebagai bahan pelatihan bagi industri batik dalam persoalan limbah penanganan limbah batik di kabupaten Sampang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat dan bentuk kesadaran UMKM Batik Shalempang dalam menghadapi persoalan lingkungan limbah

batik. Selain itu untuk memperkecil *gap* kesalahfahaman masyarakat dengan pihak UMKM Batik Shalempang terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.